



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa, pengaturan alokasi dana desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), dan ayat (7), serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DINPERMASDES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPU-PR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
11. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
22. Hari adalah hari kerja.
23. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
28. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
29. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
30. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
31. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
32. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
33. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
34. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
35. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
36. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
38. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
39. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
40. Swadaya masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki program dan kegiatan.
41. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
42. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
43. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.

44. Musyawarah Desa Serah Terima yang selanjutnya disingkat MDST adalah musyawarah desa penyerahan hasil pekerjaan dari Panitia Pelaksana Pembangunan sarana/prasarana kepada Pemerintah Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN ASAS

Pasal 2

Maksud diberikan ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa.

Pasal 3

Tujuan diberikan ADD adalah untuk :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pasal 4

- (1) Sasaran lokasi ADD adalah semua desa di wilayah Daerah sejumlah 224 (dua ratus dua puluh empat) Desa.
- (2) Sasaran Penggunaan ADD adalah untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga.

Pasal 5

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (3) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setiap tahun anggaran.

- (2) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian dan pembagian ADD ditetapkan berdasarkan rumus.
- (2) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan berdasarkan asas merata/sama untuk setiap desa dan adil.
- (3) Asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan atas dasar perhitungan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditambah dengan perhitungan pagu Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (5) Perhitungan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap desa merupakan perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal desa yang akan menentukan Nilai Bobot Desa, yang ditentukan sebesar 40% (empat puluh perseratus) yang dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data variable independen yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- (6) Data Variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bobot jumlah penduduk 20% (dua puluh perseratus);
 - b. bobot angka kemiskinan 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. bobot luas wilayah 30% (tiga puluh perseratus);
 - d. bobot tingkat kesulitan geografis desa 25% (dua puluh lima perseratus).
- (7) Lokasi dan besaran ADD masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Pengorganisasian dalam pengelolaan ADD terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pengelola Desa.

Pasal 9

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan ADD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Tim Pembina Kecamatan, dan Tim pengelola Desa;
 - c. memfasilitasi pengelolaan ADD;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan penyaluran;
 - e. mengoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperlukan.
- (3) Tim Fasilitasi Kabupaten dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Camat yang terdiri dari :
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
 - c. Para Kepala Seksi dan Kasubbag pada Sekretariat Kecamatan sebagai anggota;
 - d. Pendamping Desa.
- (2) Tim Pembina Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Kecamatan.
- (3) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. melaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan;
 - b. melaksanakan pendampingan kegiatan;
 - c. memfasilitasi permohonan pencairan;
 - d. melaksanakan asistensi penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan;
 - e. meneruskan permohonan pencairan kepada Bupati melalui DINPERMASDES;
 - f. memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - g. membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - h. mengoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan masyarakat;
 - i. melaporkan pengelolaan ADD kepada Bupati c.q Kepala DINPERMASDES;
 - j. melaksanakan Kas Opname setiap 3 (tiga) bulan sekali, membuat Berita Acara Kas Opname dan menandatangani tutup buku pada Buku Kas Umum, dan melaporkan hasil Kas Opname kepada Bupati Purbalingga c.q. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan tembusan Kepala DINPERMASDES;

- k. melakukan asistensi pengadaan barang/jasa di desa;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan ADD.

Pasal 11

- (1) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah Desa;
 - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
 - b. PTPKD, yang berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari :
 - 1. Sekretaris Desa;
 - 2. Kepala Seksi; dan
 - 3. Bendahara.
 - c. Penanggung jawab teknis pekerjaan konstruksi, dapat dibantu oleh personil dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang atau mandor).
 - d. PPHP sejumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari :
 - 1. Ketua;
 - 2. Sekretaris; dan
 - 3. Anggota.
 - e. Tim Pengawas sejumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur perangkat desa dan/atau lembaga kemasyarakatan desa, terdiri dari :
 - 1. Ketua, yang berasal dari Ketua BPD;
 - 2. Anggota sejumlah 2 (dua) orang.
- (3) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Kepala Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - 1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ADD;
 - 2. menetapkan Tim Pengelola Desa;
 - 3. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan Pendapatan Asli Desa dan swadaya masyarakat;
 - 4. mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati;
 - 5. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam ADD; dan
 - 6. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban kegiatan ADD.
 - b. PTPKD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - 1. Sekretaris Desa
 - a) menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan ADD;
 - b) menyusun dokumen perencanaan, dan pencairan ADD;
 - c) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam ADD;
 - d) menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD; dan
 - e) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran ADD.
 - 2. Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b) melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam ADD;

- c) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - g) melakukan pengadaan barang/jasa.
3. Bendahara mempunyai tugas dan fungsi yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan ADD.
4. Penanggung jawab teknis pekerjaan konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan dalam melaksanakan kegiatan konstruksi.
5. PPHP mempunyai tugas dan fungsi yaitu melakukan pemeriksaan/Pengujian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan dan atau kontrak, yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, mutu/kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian/kontrak atau tidak, serta membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut.
6. Tim Pengawas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a) melaksanakan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja;
 - b) menampung segala persoalan di lapangan dan menyampaikannya kepada pelaksana kegiatan;
 - c) membantu survey dan mengumpulkan data di lapangan;
 - d) menyusun laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan fisik.

BAB V PENGUNAAN ADD

Pasal 12

- (1) ADD digunakan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional BPD, insentif rukun tetangga dan rukun warga serta untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan mengacu kepada pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
- a. Operasional Pemerintah Desa yang dapat digunakan untuk :
 - 1) alat tulis kantor;
 - 2) benda pos;
 - 3) bahan/ Material;
 - 4) pemeliharaan;
 - 5) cetak/ Penggandaan;
 - 6) sewa Kantor Desa;
 - 7) perlengkapan dan peralatan kantor;
 - 8) makan dan minuman rapat;
 - 9) pakaian Dinas dan atributnya;
 - 10) perjalanan dinas;
 - 11) upah kerja;
 - 12) honorarium nara sumber/ahli.
 - b. Tunjangan dan operasional BPD, yang dapat digunakan untuk :
 - 1) honorarium;
 - 2) benda pos;
 - 3) cetak/penggandaan;
 - 4) alat tulis kantor;
 - 5) biaya pembuatan laporan;
 - 6) makanan dan minuman rapat;
 - 7) perjalanan dinas;
 - c. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melaksanakan kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (6) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan yang tercantum dalam APB Desa, sesuai dengan kebutuhan Desa yang dituangkan dalam RAB dan/atau analisis serta gambar desain.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat terdiri atas jenis belanja :
- a. pegawai;
 - b. barang dan Jasa; dan
 - c. modal.

Pasal 13

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan sesuai kemampuan APB Desa.

Pasal 14

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga /Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 15

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 16

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan tercantum dalam RKP Desa dan APB Desa.
- (2) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. tokoh/pemuka adat;
 - b. tokoh/pemuka agama;
 - c. tokoh/pemuka masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;

- e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat seperti kelompok pemuda, kelompok olah raga, kelompok seni dan budaya, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan unsur masyarakat lainnya.

BAB VI PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa menyusun dokumen penyaluran ADD berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang APB Desa dan RKP Desa tahun berkenaan.
- (2) Rancangan dokumen penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah desa.

Pasal 18

- (1) Rancangan dokumen pencairan ADD yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi.
- (2) Camat menyampaikan hasil verifikasi yang telah dinyatakan lengkap dan benar kepada Bupati melalui DINPERMASDES.

Pasal 19

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan secara langsung dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah DINPERMASDES meneruskan permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui BAKEUDA.
- (4) BAKEUDA melakukan pemindahbukuan secara langsung dari RKUD ke RKD setelah berkas dinyatakan lengkap.

Pasal 20

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD masing-masing desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa;
 2. Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari Kecamatan;
 3. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana yang telah diverifikasi dari Kecamatan;
 4. Surat Pernyataan Penyaluran ADD;
 5. Berita Acara Penyaluran ADD;
 6. Kuitansi Pembayaran;
 7. Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;
 8. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 9. Berita acara musyawarah desa;
 10. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
 11. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan fisik dan non fisik;
 12. Foto kondisi 0 % (nol perseratus);
 13. Foto copy nomor rekening pemerintah desa;
 14. Pakta integritas;
 15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 16. Laporan Realisasi ADD Tahun sebelumnya;
 17. Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD, dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
 2. Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari Kecamatan;
 3. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana dari Camat;
 4. Berita Acara Penyaluran Alokasi Dana Desa;
 5. Kuitansi Pembayaran;
 6. Laporan realisasi kegiatan minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari pencairan Tahap I;
 7. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
 8. Foto copy buku rekening pemerintah desa;
 9. Laporan penggunaan ADD tahap I (Menunjukkan paling kurang ADD tahap 1 telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus));
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD, dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
 2. Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari Kecamatan;
 3. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat;
 4. Berita Acara Penyaluran Alokasi Dana Desa;
 5. Kuitansi Pembayaran;
 6. Laporan realisasi kegiatan minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penyaluran Tahap I dan Tahap II;

7. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
 8. Foto copy buku rekening pemerintah desa;
 9. Laporan penggunaan ADD tahap II (Menunjukkan paling kurang ADD tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- (3) Format dokumen Penyaluran dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan ADD dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 22

- (1) Pengeluaran desa yang berasal dari ADD dan mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya ADD yang telah diverifikasi.
- (2) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 25

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Perubahan RAB dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam swadaya desa pada tahun berjalan;
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RAB hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Perubahan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 29

Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD berpedoman pada penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 30

Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan maka sisa Alokasi Dana Desa menjadi SILPA dan dianggarkan kembali pada APB Desa tahun berikutnya.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI ADD

Pasal 31

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 32

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pembina Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan khusus oleh Bagian Layanan Pengadaan Setda dan/atau Tim Pembina Kecamatan.

- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (kas opname) yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pasal 33

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 34

Evaluasi pengelolaan ADD dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat pengelola kegiatan sebagai bahan perumusan kebijakan pada masa yang akan datang.

BAB IX SANKSI

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat SILPA ADD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD.
- (3) SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena :
 - a. penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan;
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (4) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengurangan pagu ADD yang bersangkutan tahun anggaran berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 3



LOKASI DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama Desa	Kebutuhan Siltap	ADDM	ADDP															ADDM +ADDP	Pagu ADD (SILTAP+ADDM+A DDP)
				Jumlah Penduduk			Kemiskinan			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula			
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	+ (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15)	(17)	(18)= (3) + (17)						
1	KEMANGKON																			
	1 KEDUNGBENDA	261,250,000	108,774,493	4542	0.51%	0.10%	925	0.52%	0.13%	4.06	0.61%	0.18%	38.89	0.53%	0.13%	0.55%	88,870,214	197,645,000	458,895,000	
	2 BOKOL	223,750,000	108,774,493	2167	0.24%	0.05%	462	0.26%	0.06%	1.33	0.20%	0.06%	31.04	0.42%	0.11%	0.28%	45,289,473	154,064,000	377,814,000	
	3 PELUMUTAN	242,500,000	108,774,493	3545	0.40%	0.08%	744	0.42%	0.10%	2.33	0.35%	0.11%	35.49	0.48%	0.12%	0.41%	66,532,956	175,307,000	417,807,000	
	4 MAJATENGAH	236,250,000	108,774,493	3767	0.42%	0.08%	678	0.38%	0.09%	3.08	0.46%	0.14%	38.14	0.52%	0.13%	0.45%	72,815,911	181,590,000	417,840,000	
	5 KEDUNGLEGOK	242,500,000	108,774,493	3338	0.38%	0.08%	603	0.34%	0.08%	2.46	0.37%	0.11%	36.65	0.50%	0.12%	0.40%	64,190,621	172,965,000	415,465,000	
	6 KEMANGKON	242,500,000	108,774,493	4224	0.47%	0.09%	938	0.52%	0.13%	2.56	0.39%	0.12%	38.23	0.52%	0.13%	0.47%	76,635,026	185,410,000	427,910,000	
	7 PANICAN	255,000,000	108,774,493	4917	0.55%	0.11%	672	0.38%	0.09%	2.92	0.44%	0.13%	23.07	0.31%	0.08%	0.42%	67,433,088	176,208,000	431,208,000	
	8 BAKULAN	223,750,000	108,774,493	2057	0.23%	0.05%	195	0.11%	0.03%	1.32	0.20%	0.06%	37.96	0.52%	0.13%	0.26%	42,588,523	151,363,000	375,113,000	
	9 KARANGKEMIRI	242,500,000	108,774,493	2147	0.24%	0.05%	252	0.14%	0.04%	1.86	0.28%	0.08%	30.44	0.41%	0.10%	0.27%	44,066,031	152,841,000	395,341,000	
	10 PEGANDEKAN	242,500,000	108,774,493	2888	0.32%	0.06%	416	0.23%	0.06%	2.30	0.35%	0.10%	36.84	0.50%	0.13%	0.35%	57,226,935	166,001,000	408,501,000	
	11 SENON	298,750,000	108,774,493	4850	0.55%	0.11%	630	0.35%	0.09%	3.54	0.53%	0.16%	38.38	0.52%	0.13%	0.49%	79,237,736	188,012,000	486,762,000	
	12 SUMILIR	273,750,000	108,774,493	1828	0.21%	0.04%	271	0.15%	0.04%	2.33	0.35%	0.11%	38.92	0.53%	0.13%	0.32%	51,442,177	160,217,000	433,967,000	
	13 KALIALANG	236,250,000	108,774,493	1417	0.16%	0.03%	146	0.08%	0.02%	2.23	0.34%	0.10%	33.15	0.45%	0.11%	0.27%	43,169,263	151,944,000	388,194,000	
	14 KARANGTENGAH	298,750,000	108,774,493	3051	0.34%	0.07%	571	0.32%	0.08%	2.23	0.34%	0.10%	33.52	0.46%	0.11%	0.36%	58,979,060	167,754,000	466,504,000	
	15 MUNTANG	198,750,000	108,774,493	1743	0.20%	0.04%	134	0.07%	0.02%	1.60	0.24%	0.07%	33.04	0.45%	0.11%	0.24%	39,422,881	148,197,000	346,947,000	
	16 GAMBARSARI	236,250,000	108,774,493	1657	0.19%	0.04%	220	0.12%	0.03%	1.61	0.24%	0.07%	24.67	0.34%	0.08%	0.22%	36,500,381	145,275,000	381,525,000	
	17 TOYAREKA	261,250,000	108,774,493	5681	0.64%	0.13%	375	0.21%	0.05%	3.31	0.50%	0.15%	29.57	0.40%	0.10%	0.43%	69,912,444	178,687,000	439,937,000	
	18 JETIS	217,500,000	108,774,493	3262	0.37%	0.07%	392	0.22%	0.05%	1.93	0.29%	0.09%	33.11	0.45%	0.11%	0.33%	53,306,065	162,081,000	379,581,000	
	19 MAJASEM	255,000,000	108,774,493	3605	0.41%	0.08%	466	0.26%	0.07%	2.15	0.32%	0.10%	36.76	0.50%	0.13%	0.37%	59,890,980	168,665,000	423,665,000	
2	BUKATEJA																			
	1 TIDU	242,500,000	108,774,493	3017	0.34%	0.07%	640	0.36%	0.09%	1.55	0.23%	0.07%	31.74	0.43%	0.11%	0.34%	54,449,953	163,224,000	405,724,000	
	2 WIRASABA	317,500,000	108,774,493	5147	0.58%	0.12%	1218	0.68%	0.17%	3.56	0.54%	0.16%	32.65	0.44%	0.11%	0.56%	90,626,665	199,401,000	516,901,000	
	3 KEMBANGAN	255,000,000	108,774,493	8057	0.91%	0.18%	2274	1.27%	0.32%	4.35	0.66%	0.20%	24.83	0.34%	0.08%	0.78%	126,667,466	235,442,000	490,442,000	
	4 CIPAWON	255,000,000	108,774,493	6150	0.69%	0.14%	1352	0.75%	0.19%	2.86	0.43%	0.13%	25.01	0.34%	0.09%	0.54%	87,975,653	196,750,000	451,750,000	
	5 KARANGCENGIS	248,750,000	108,774,493	6435	0.72%	0.14%	1330	0.74%	0.19%	3.70	0.56%	0.17%	33.12	0.45%	0.11%	0.61%	99,170,446	207,945,000	456,695,000	
	6 KARANGGEDANG	236,250,000	108,774,493	6533	0.73%	0.15%	1787	1.00%	0.25%	2.92	0.44%	0.13%	32.63	0.44%	0.11%	0.64%	103,894,486	212,669,000	448,919,000	
	7 KARANGNANGKA	211,250,000	108,774,493	2794	0.31%	0.06%	860	0.48%	0.12%	1.59	0.24%	0.07%	37.91	0.52%	0.13%	0.38%	62,332,627	171,107,000	382,357,000	
	8 KUTAWIS	255,000,000	108,774,493	6793	0.76%	0.15%	2166	1.21%	0.30%	4.45	0.67%	0.20%	19.68	0.27%	0.07%	0.72%	117,494,465	226,269,000	481,269,000	
	9 KEBUTUH	255,000,000	108,774,493	3999	0.45%	0.09%	408	0.23%	0.06%	3.29	0.50%	0.15%	33.41	0.45%	0.11%	0.41%	66,488,303	175,263,000	430,263,000	
	10 PENARUBAN	198,750,000	108,774,493	1912	0.21%	0.04%	453	0.25%	0.06%	1.24	0.19%	0.06%	32.06	0.44%	0.11%	0.27%	44,124,374	152,899,000	351,649,000	
	11 KEDUNGJATI	236,250,000	108,774,493	7354	0.83%	0.17%	929	0.52%	0.13%	4.55	0.69%	0.21%	34.91	0.48%	0.12%	0.62%	100,673,744	209,448,000	445,698,000	
	12 BUKATEJA	255,000,000	108,774,493	8280	0.93%	0.19%	893	0.50%	0.12%	3.66	0.55%	0.17%	18.47	0.25%	0.06%	0.54%	87,605,489	196,380,000	451,380,000	
	13 MAJASARI	255,000,000	108,774,493	4146	0.47%	0.09%	809	0.45%	0.11%	2.08	0.31%	0.09%	30.17	0.41%	0.10%	0.40%	65,475,308	174,250,000	429,250,000	
	14 BAJONG	273,750,000	108,774,493	4449	0.50%	0.10%	553	0.31%	0.08%	3.44	0.52%	0.16%	27.08	0.37%	0.09%	0.42%	69,032,560	177,807,000	451,557,000	
3	KEJOBONG																			
	1 BANDINGAN	255,000,000	108,774,493	5516	0.62%	0.12%	819	0.46%	0.11%	2.95	0.45%	0.13%	20.88	0.28%	0.07%	0.44%	71,961,689	180,736,000	435,736,000	
	2 LAMUK	261,250,000	108,774,493	3478	0.39%	0.08%	359	0.20%	0.05%	3.14	0.47%	0.14%	40.26	0.55%	0.14%	0.41%	66,148,005	174,922,000	436,172,000	
	3 SOKANEGARA	261,250,000	108,774,493	3112	0.35%	0.07%	666	0.37%	0.09%	2.55	0.38%	0.12%	42.70	0.58%	0.15%	0.42%	68,810,379	177,585,000	438,835,000	
	4 GUMIWANG	205,000,000	108,774,493	2350	0.26%	0.05%	172	0.10%	0.02%	2.19	0.33%	0.10%	32.91	0.45%	0.11%	0.29%	46,739,977	155,514,000	360,514,000	
	5 KRENCENG	226,250,000	108,774,493	3465	0.39%	0.08%	880	0.49%	0.12%	2.24	0.34%	0.10%	29.34	0.40%	0.10%	0.40%	65,255,937	174,030,000	400,280,000	
	6 NANGKASAWIT	192,500,000	108,774,493	1842	0.21%	0.04%	502	0.28%	0.07%	1.52	0.23%	0.07%	48.02	0.65%	0.16%	0.34%	55,815,266	164,590,000	357,090,000	
	7 PANDANSARI	255,000,000	108,774,493	3739	0.42%	0.08%	996	0.56%	0.14%	3.28	0.49%	0.15%	44.56	0.61%	0.15%	0.52%	84,961,303	193,736,000	448,736,000	
	8 KEJOBONG	255,000,000	108,774,493	5738	0.65%	0.13%	949	0.53%	0.13%	4.29	0.65%	0.19%	29.44	0.40%	0.10%	0.56%	90,263,905	199,038,000	454,038,000	
	9 LANGGAR	236,250,000	108,774,493	6650	0.75%	0.15%	1764	0.98%	0.25%	5.22	0.79%	0.24%	38.54	0.52%	0.13%	0.76%	123,941,719	232,716,000	468,966,000	
	10 TIMBANG	261,250,000	108,774,493	3383	0.38%	0.08%	522	0.29%	0.07%	3.16	0.48%	0.14%	25.67	0.35%	0.09%	0.38%	61,573,865	170,348,000	431,598,000	
	11 NANGKOD	223,750,000	108,774,493	2716	0.31%	0.06%	342	0.19%	0.05%	3.97	0.60%	0.18%	46.52	0.63%	0.16%	0.45%	72,535,328	181,310,000	405,060,000	
	12 KEDARPAN	217,500,000	108,774,493	2164	0.24%	0.05%	432	0.24%	0.06%	2.27	0.34%	0.10%	48.36	0.66%	0.16%	0.38%	61,090,594	169,865,000	387,365,000	
	13 PANGEMPON	198,750,000	108,774,493	4558	0.51%	0.10%	771	0.43%	0.11%	3.63	0.55%	0.16%	46.65	0.64%	0.16%	0.53%	86,608,226	195,383,000	394,133,000	
4	KALIGONDANG																			
	1 LAMONGAN	234,750,000	108,774,493	2484	0.28%	0.06%	332	0.19%	0.05%	0.95	0.14%	0.04%	41.37	0.56%	0.14%	0.29%	46,464,140	155,239,000	389,989,000	
	2 TEJASARI	255,000,000	108,774,493	2506	0.28%	0.06%	242	0.14%	0.03%	2.22	0.33%	0.10%	37.57	0.51						

	3	CILAPAR	236,250,000	108,774,493	1879	0.21%	0.04%	222	0.12%	0.03%	2.46	0.37%	0.11%	41.88	0.57%	0.14%	0.33%	53,119,046	161,894,000	398,144,000
	4	PENOLIH	248,750,000	108,774,493	3596	0.40%	0.08%	362	0.20%	0.05%	3.16	0.48%	0.14%	31.40	0.43%	0.11%	0.38%	61,898,020	170,673,000	419,423,000
	5	SINDURAJA	230,000,000	108,774,493	4783	0.54%	0.11%	932	0.52%	0.13%	2.72	0.41%	0.12%	25.93	0.35%	0.09%	0.45%	72,931,091	181,706,000	411,706,000
	6	SELEKAMBANG	255,000,000	108,774,493	7937	0.89%	0.18%	1844	1.03%	0.26%	6.16	0.93%	0.28%	25.69	0.35%	0.09%	0.80%	130,259,844	239,034,000	494,034,000
	7	SELANEGARA	230,000,000	108,774,493	3190	0.36%	0.07%	449	0.25%	0.06%	2.27	0.34%	0.10%	31.17	0.42%	0.11%	0.34%	55,719,910	164,494,000	394,494,000
	8	KALIGONDANG	261,250,000	108,774,493	3051	0.34%	0.07%	207	0.12%	0.03%	2.83	0.43%	0.13%	22.09	0.30%	0.08%	0.30%	48,867,860	157,642,000	418,892,000
	9	BRECEK	205,000,000	108,774,493	1345	0.15%	0.03%	130	0.07%	0.02%	1.42	0.21%	0.06%	38.61	0.53%	0.13%	0.24%	39,616,001	148,390,000	353,390,000
	10	SEMPOR LOR	205,000,000	108,774,493	1175	0.13%	0.03%	70	0.04%	0.01%	0.93	0.14%	0.04%	43.27	0.59%	0.15%	0.23%	36,645,600	145,420,000	350,420,000
	11	PENARUBAN	242,500,000	108,774,493	4758	0.53%	0.11%	209	0.12%	0.03%	1.17	0.18%	0.05%	25.25	0.34%	0.09%	0.28%	44,705,090	153,480,000	395,980,000
	12	KALIKAJAR	242,500,000	108,774,493	4349	0.49%	0.10%	517	0.29%	0.07%	1.75	0.26%	0.08%	19.30	0.26%	0.07%	0.31%	51,138,381	159,913,000	402,413,000
	13	KEMBARAN WETAN	236,250,000	108,774,493	2943	0.33%	0.07%	224	0.13%	0.03%	2.44	0.37%	0.11%	35.26	0.48%	0.12%	0.33%	53,243,138	162,018,000	398,268,000
	14	SLINGA	236,250,000	108,774,493	5061	0.57%	0.11%	640	0.36%	0.09%	3.94	0.59%	0.18%	32.45	0.44%	0.11%	0.49%	79,850,884	188,625,000	424,875,000
	15	ARENAN	255,000,000	108,774,493	3695	0.42%	0.08%	526	0.29%	0.07%	5.72	0.86%	0.26%	34.10	0.46%	0.12%	0.53%	86,276,398	195,051,000	450,051,000
	16	SIDANEGARA	205,000,000	108,774,493	3136	0.35%	0.07%	649	0.36%	0.09%	2.42	0.36%	0.11%	29.27	0.40%	0.10%	0.37%	60,119,813	168,894,000	373,894,000
	17	PAGERANDONG	248,750,000	108,774,493	2026	0.23%	0.05%	593	0.33%	0.08%	2.26	0.34%	0.10%	39.25	0.53%	0.13%	0.36%	59,124,231	167,899,000	416,649,000
	18	SIDAREJA	223,750,000	108,774,493	4650	0.52%	0.10%	1198	0.67%	0.17%	5.43	0.82%	0.25%	31.02	0.42%	0.11%	0.62%	101,210,170	209,985,000	433,735,000
5	PUREBALINGGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	TOYAREJA	198,750,000	108,774,493	2747	0.31%	0.06%	321	0.18%	0.04%	1.77	0.27%	0.08%	33.84	0.46%	0.12%	0.30%	49,030,966	157,805,000	356,555,000
	2	JATISABA	248,750,000	108,774,493	3386	0.38%	0.08%	382	0.21%	0.05%	2.08	0.31%	0.09%	27.06	0.37%	0.09%	0.32%	51,302,531	160,077,000	408,827,000
6	KALIMANAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	JOMPO	223,750,000	108,774,493	2124	0.24%	0.05%	146	0.08%	0.02%	1.11	0.17%	0.05%	29.33	0.40%	0.10%	0.22%	35,463,829	144,238,000	367,988,000
	2	RABAK	198,750,000	108,774,493	2974	0.33%	0.07%	142	0.08%	0.02%	1.94	0.29%	0.09%	26.02	0.35%	0.09%	0.26%	42,745,438	151,520,000	350,270,000
	3	BLATER	236,250,000	108,774,493	3615	0.41%	0.08%	172	0.10%	0.02%	2.01	0.30%	0.09%	28.36	0.39%	0.10%	0.29%	47,579,855	156,354,000	392,604,000
	4	MANDURAGA	198,750,000	108,774,493	1831	0.21%	0.04%	123	0.07%	0.02%	0.90	0.14%	0.04%	34.93	0.48%	0.12%	0.22%	35,411,660	144,186,000	342,936,000
	5	KARANGSARI	198,750,000	108,774,493	1709	0.19%	0.04%	111	0.06%	0.02%	1.01	0.15%	0.05%	35.16	0.48%	0.12%	0.22%	35,637,754	144,412,000	343,162,000
	6	KALIMANAH KULON	205,000,000	108,774,493	2110	0.24%	0.05%	56	0.03%	0.01%	1.11	0.17%	0.05%	38.42	0.52%	0.13%	0.24%	38,401,677	147,176,000	352,176,000
	7	SIDAKANGEN	198,750,000	108,774,493	2420	0.27%	0.05%	170	0.09%	0.02%	0.95	0.14%	0.04%	32.05	0.44%	0.11%	0.23%	37,406,146	146,181,000	344,931,000
	8	KARANGPETIR	198,750,000	108,774,493	1325	0.15%	0.03%	107	0.06%	0.01%	0.89	0.13%	0.04%	39.40	0.54%	0.13%	0.22%	35,593,816	144,368,000	343,118,000
	9	KALIMANAH WETAN	242,500,000	108,774,493	3223	0.36%	0.07%	249	0.14%	0.03%	1.49	0.22%	0.07%	25.03	0.34%	0.09%	0.26%	42,184,190	150,959,000	393,459,000
	10	GRECOL	261,250,000	108,774,493	3827	0.43%	0.09%	344	0.19%	0.05%	2.01	0.30%	0.09%	35.49	0.48%	0.12%	0.35%	56,197,427	164,972,000	426,222,000
	11	SELABAYA	213,750,000	108,774,493	3814	0.43%	0.09%	116	0.06%	0.02%	1.10	0.17%	0.05%	28.20	0.38%	0.10%	0.25%	40,260,564	149,035,000	362,785,000
	12	KLAPASAWIT	211,250,000	108,774,493	4399	0.49%	0.10%	248	0.14%	0.03%	1.51	0.23%	0.07%	40.59	0.55%	0.14%	0.34%	55,211,795	163,986,000	375,236,000
	13	KEDUNGWULUH	205,000,000	108,774,493	3164	0.36%	0.07%	179	0.10%	0.02%	1.82	0.27%	0.08%	37.00	0.50%	0.13%	0.30%	49,457,461	158,232,000	363,232,000
	14	BABAKAN	261,250,000	108,774,493	6598	0.74%	0.15%	623	0.35%	0.09%	1.82	0.27%	0.08%	22.81	0.31%	0.08%	0.40%	64,213,565	172,988,000	434,238,000
7	KUTASARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	KARANGLEWAS	230,000,000	108,774,493	2528	0.28%	0.06%	325	0.18%	0.05%	1.01	0.15%	0.05%	29.37	0.40%	0.10%	0.25%	40,277,361	149,052,000	379,052,000
	2	MUNJUL	242,500,000	108,774,493	3528	0.40%	0.08%	556	0.31%	0.08%	1.52	0.23%	0.07%	33.90	0.46%	0.12%	0.34%	55,387,849	164,162,000	406,662,000
	3	SUMINGKIR	261,250,000	108,774,493	4890	0.55%	0.11%	1357	0.76%	0.19%	1.88	0.28%	0.09%	35.65	0.49%	0.12%	0.51%	82,159,767	190,934,000	452,184,000
	4	MERI	255,000,000	108,774,493	3805	0.43%	0.09%	902	0.50%	0.13%	1.70	0.26%	0.08%	31.72	0.43%	0.11%	0.40%	64,372,353	173,147,000	428,147,000
	5	KUTASARI	242,500,000	108,774,493	4904	0.55%	0.11%	629	0.35%	0.09%	2.03	0.31%	0.09%	22.69	0.31%	0.08%	0.37%	59,660,359	168,435,000	410,935,000
	6	KARANGKLESEM	205,000,000	108,774,493	3186	0.36%	0.07%	291	0.16%	0.04%	1.32	0.20%	0.06%	32.16	0.44%	0.11%	0.28%	45,683,814	154,458,000	359,458,000
	7	KARANGREJA	242,500,000	108,774,493	6037	0.68%	0.14%	1526	0.85%	0.21%	2.75	0.41%	0.12%	41.37	0.56%	0.14%	0.61%	99,734,375	208,509,000	451,009,000
	8	KARANGAREN	186,250,000	108,774,493	1423	0.16%	0.03%	189	0.11%	0.03%	0.73	0.11%	0.03%	31.90	0.43%	0.11%	0.20%	32,474,490	141,249,000	327,499,000
	9	LIMBANGAN	223,750,000	108,774,493	4201	0.47%	0.09%	794	0.44%	0.11%	2.08	0.31%	0.09%	34.98	0.48%	0.12%	0.42%	67,998,314	176,773,000	400,523,000
	10	CENDANA	280,000,000	108,774,493	4786	0.54%	0.11%	1679	0.94%	0.23%	5.65	0.85%	0.26%	39.99	0.54%	0.14%	0.73%	119,203,756	227,978,000	507,978,000
	11	CANDIWULAN	248,750,000	108,774,493	5361	0.60%	0.12%	1503	0.84%	0.21%	3.40	0.51%	0.15%	27.15	0.37%	0.09%	0.58%	93,640,780	202,415,000	451,165,000
	12	KARANGCEGAK	242,500,000	108,774,493	6440	0.72%	0.14%	2751	1.54%	0.38%	4.19	0.63%	0.19%	27.03	0.37%	0.09%	0.81%	131,600,554	240,375,000	482,875,000
	13	CANDINATA	236,250,000	108,774,493	5565	0.63%	0.13%	2304	1.29%	0.32%	6.67	1.01%	0.30%	32.72	0.45%	0.11%	0.86%	139,629,513	248,404,000	484,654,000
	14	KARANGJENGKOL	267,500,000	108,774,493	4095	0.46%	0.09%	1606	0.90%	0.22%	3.62	0.55%	0.16%	30.53	0.42%	0.10%	0.58%	94,854,254	203,629,000	471,129,000
8	MREBET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	KARANGTURI	223,750,000	108,774,493	2986	0.34%	0.07%	358	0.20%	0.05%	1.42	0.21%	0.06%	38.66	0.53%	0.13%	0.31%	50,810,961	159,585,000	383,335,000
	2	ONJE	236,250,000	108,774,493	4344	0.49%	0.10%	383	0.21%	0.05%	3.87	0.58%	0.18%	39.28	0.53%	0.13%	0.46%	74,741,288	183,516,000	419,766,000
	3	SINDANG	211,250,000	108,774,493	3063	0.34%	0.07%	668	0.37%	0.09%	3.80	0.57%	0.17%	36.85	0.50%	0.13%	0.46%	74,659,115	183,434,000	394,684,000
	4	TANGKISAN	255,000,000	108,774,493	5251	0.59%	0.12%	958	0.53%	0.13%	5.87	0.88%	0.27%	28.16	0.38%	0.10%	0.61%	99,577,677	208,352,000	463,352,000
	5	KRADENAN	211,250,000	108,774,493	2467	0.28%	0.06%	340	0.19%	0.05%	1.07	0.16%	0.05%	33.34	0.45%	0.11%	0.26%	43,035,204	151,810,000	363,060,000
	6	LAMBUR	192,500,000	108,774,493	2763	0.31%	0.06%	631	0.35%	0.09%	1.42	0.21%	0.06%	32.42	0.44%	0.11%	0.32%	52,729,032	161,504,000	354,004,000
	7	SELAGANGGENG	211,250,000	108,774,493	3742	0.42%	0.08%	763	0.43%	0.11%	1.60	0.24%	0.07%	28.44	0.39%	0.10%	0.36%	58,437,817	167,212,000	378,462,000
	8	MANGUNEGARA	211,250,000	108,774,493	3686	0.41%	0.08%	308	0.17%	0.04%	1.34	0.20%	0.06%	27.04	0.37%	0.09%	0.28%	45,209,431	153,984,000	

	12	SERAYU KARANGANYAR	217,500,000	108,774,493	2597	0.29%	0.06%	725	0.40%	0.10%	1.21	0.18%	0.05%	40.46	0.55%	0.14%	0.35%	57,215,569	165,990,000	383,490,000
	13	SERAYU LARANGAN	223,750,000	108,774,493	3739	0.42%	0.08%	1097	0.61%	0.15%	1.86	0.28%	0.08%	24.46	0.33%	0.08%	0.40%	65,727,215	174,502,000	398,252,000
	14	CAMPAKOAH	192,500,000	108,774,493	2772	0.31%	0.06%	700	0.39%	0.10%	1.39	0.21%	0.06%	36.87	0.50%	0.13%	0.35%	56,565,276	165,340,000	357,840,000
	15	PAGERANDONG	217,500,000	108,774,493	4150	0.47%	0.09%	1109	0.62%	0.15%	3.34	0.50%	0.15%	30.31	0.41%	0.10%	0.50%	81,584,040	190,359,000	407,859,000
	16	CIPAKU	273,750,000	108,774,493	7761	0.87%	0.17%	1662	0.93%	0.23%	3.42	0.52%	0.15%	25.60	0.35%	0.09%	0.65%	105,299,390	214,074,000	487,824,000
	17	BINANGUN	236,250,000	108,774,493	3876	0.44%	0.09%	1704	0.95%	0.24%	3.82	0.58%	0.17%	33.14	0.45%	0.11%	0.61%	99,207,244	207,982,000	444,232,000
	18	PENGALUSAN	230,000,000	108,774,493	6240	0.70%	0.14%	1827	1.02%	0.25%	3.95	0.59%	0.18%	30.73	0.42%	0.10%	0.68%	110,187,766	218,962,000	448,962,000
	19	SANGKANAYU	205,000,000	108,774,493	4854	0.55%	0.11%	2148	1.20%	0.30%	2.25	0.34%	0.10%	31.89	0.43%	0.11%	0.62%	100,551,389	209,326,000	414,326,000
9	BOBOTSARI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	GANDASULI	211,250,000	108,774,493	2619	0.29%	0.06%	265	0.15%	0.04%	0.83	0.13%	0.04%	23.67	0.32%	0.08%	0.21%	34,758,243	143,533,000	354,783,000
	2	KALAPACUNG	186,250,000	108,774,493	2399	0.27%	0.05%	653	0.36%	0.09%	1.24	0.19%	0.06%	33.41	0.45%	0.11%	0.32%	51,181,035	159,956,000	346,206,000
	3	KARANGMALANG	230,000,000	108,774,493	3239	0.36%	0.07%	632	0.35%	0.09%	2.43	0.37%	0.11%	23.40	0.32%	0.08%	0.35%	56,933,793	165,708,000	395,708,000
	4	BANJARSARI	230,000,000	108,774,493	3730	0.42%	0.08%	796	0.44%	0.11%	2.46	0.37%	0.11%	34.78	0.47%	0.12%	0.42%	68,961,878	177,736,000	407,736,000
	5	MAJAPURA	262,750,000	108,774,493	4635	0.52%	0.10%	387	0.22%	0.05%	1.42	0.21%	0.06%	29.30	0.40%	0.10%	0.32%	52,315,048	161,090,000	423,840,000
	6	BOBOTSARI	236,250,000	108,774,493	6517	0.73%	0.15%	688	0.38%	0.10%	1.47	0.22%	0.07%	20.10	0.27%	0.07%	0.38%	61,294,739	170,069,000	406,319,000
	7	KARANGDUREN	211,250,000	108,774,493	3352	0.38%	0.08%	1009	0.56%	0.14%	1.23	0.19%	0.06%	35.19	0.48%	0.12%	0.39%	63,644,764	172,419,000	383,669,000
	8	PAKUNCEN	217,500,000	108,774,493	3015	0.34%	0.07%	760	0.42%	0.11%	1.62	0.24%	0.07%	36.95	0.50%	0.13%	0.37%	60,564,059	169,339,000	386,839,000
	9	KARANGTALUN	223,750,000	108,774,493	3724	0.42%	0.08%	810	0.45%	0.11%	1.80	0.27%	0.08%	43.17	0.59%	0.15%	0.43%	69,065,052	177,840,000	401,590,000
	10	GUNUNGKARANG	236,250,000	108,774,493	1992	0.22%	0.04%	460	0.26%	0.06%	1.34	0.20%	0.06%	32.90	0.45%	0.11%	0.28%	45,708,478	154,483,000	390,733,000
	11	TALAGENING	205,000,000	108,774,493	3551	0.40%	0.08%	1349	0.75%	0.19%	1.97	0.30%	0.09%	32.04	0.44%	0.11%	0.47%	75,763,025	184,538,000	389,538,000
	12	TLAGAYASA	198,750,000	108,774,493	3105	0.35%	0.07%	1400	0.78%	0.20%	2.02	0.31%	0.09%	27.35	0.37%	0.09%	0.45%	73,065,290	181,840,000	380,590,000
	13	DAGAN	248,750,000	108,774,493	3693	0.42%	0.08%	395	0.22%	0.06%	1.62	0.24%	0.07%	31.68	0.43%	0.11%	0.32%	51,854,040	160,629,000	409,379,000
	14	PALUMBUNGAN	155,000,000	108,774,493	1999	0.22%	0.04%	371	0.21%	0.05%	1.83	0.28%	0.08%	31.58	0.43%	0.11%	0.29%	46,630,694	155,405,000	310,405,000
	15	LIMBASARI	205,000,000	108,774,493	3489	0.39%	0.08%	1007	0.56%	0.14%	2.23	0.34%	0.10%	30.61	0.42%	0.10%	0.42%	68,851,571	177,626,000	382,626,000
	16	PALUMBUNGAN WETAN	155,000,000	108,774,493	1394	0.16%	0.03%	365	0.20%	0.05%	1.32	0.20%	0.06%	36.24	0.49%	0.12%	0.27%	43,067,359	151,842,000	306,842,000
10	KARANGREJA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	SERANG	242,500,000	108,774,493	7362	0.83%	0.17%	2281	1.27%	0.32%	13.25	2.00%	0.60%	30.76	0.42%	0.10%	1.19%	192,972,255	301,747,000	544,247,000
	2	KUTABAWA	255,000,000	108,774,493	6187	0.70%	0.14%	2137	1.19%	0.30%	7.69	1.16%	0.35%	23.37	0.32%	0.08%	0.86%	140,450,547	249,225,000	504,225,000
	3	SIWARAK	242,500,000	108,774,493	6784	0.76%	0.15%	2038	1.14%	0.28%	6.30	0.95%	0.29%	32.76	0.45%	0.11%	0.83%	135,399,805	244,174,000	486,674,000
	4	TLAHAB LOR	255,000,000	108,774,493	8660	0.97%	0.19%	2400	1.34%	0.33%	5.87	0.88%	0.27%	26.28	0.36%	0.09%	0.88%	143,675,075	252,450,000	507,450,000
	5	TLAHAB KIDUL	217,500,000	108,774,493	5427	0.61%	0.12%	2034	1.14%	0.28%	6.01	0.91%	0.27%	29.90	0.41%	0.10%	0.78%	126,610,353	235,385,000	452,885,000
	6	KARANGREJA	211,250,000	108,774,493	5534	0.62%	0.12%	1589	0.89%	0.22%	4.36	0.66%	0.20%	19.20	0.26%	0.07%	0.61%	98,885,859	207,660,000	418,910,000
	7	GONDANG	236,250,000	108,774,493	3682	0.41%	0.08%	1343	0.75%	0.19%	5.17	0.78%	0.23%	32.04	0.44%	0.11%	0.61%	99,593,592	208,368,000	444,618,000
11	KARANGANYAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	PONJEN	236,250,000	108,774,493	3610	0.41%	0.08%	1061	0.59%	0.15%	2.07	0.31%	0.09%	30.53	0.42%	0.10%	0.43%	69,355,080	178,130,000	414,380,000
	2	BUARA	211,250,000	108,774,493	1567	0.18%	0.04%	281	0.16%	0.04%	1.61	0.24%	0.07%	39.85	0.54%	0.14%	0.28%	45,947,297	154,722,000	365,972,000
	3	BRAKAS	205,000,000	108,774,493	1923	0.22%	0.04%	537	0.30%	0.07%	1.11	0.17%	0.05%	32.63	0.44%	0.11%	0.28%	45,429,983	154,204,000	359,204,000
	4	BUNGKANEL	236,250,000	108,774,493	2751	0.31%	0.06%	326	0.18%	0.05%	2.31	0.35%	0.10%	19.61	0.27%	0.07%	0.28%	45,229,478	154,004,000	390,254,000
	5	LUMPANG	198,750,000	108,774,493	1510	0.17%	0.03%	278	0.16%	0.04%	1.17	0.18%	0.05%	37.07	0.50%	0.13%	0.25%	40,937,948	149,712,000	348,462,000
	6	KARANGGEDANG	211,250,000	108,774,493	2052	0.23%	0.05%	358	0.20%	0.05%	1.32	0.20%	0.06%	29.05	0.40%	0.10%	0.25%	41,341,048	150,116,000	361,366,000
	7	KABUNDERAN	180,000,000	108,774,493	1251	0.14%	0.03%	132	0.07%	0.02%	0.93	0.14%	0.04%	30.90	0.42%	0.11%	0.19%	31,491,199	140,266,000	320,266,000
	8	JAMBUDESA	211,250,000	108,774,493	3205	0.36%	0.07%	859	0.48%	0.12%	1.91	0.29%	0.09%	37.97	0.52%	0.13%	0.41%	66,225,206	175,000,000	386,250,000
	9	MARIBAYA	198,750,000	108,774,493	3931	0.44%	0.09%	1132	0.63%	0.16%	3.14	0.47%	0.14%	31.30	0.43%	0.11%	0.49%	80,367,334	189,142,000	387,892,000
	10	KARANGANYAR	223,750,000	108,774,493	4640	0.52%	0.10%	1073	0.60%	0.15%	2.79	0.42%	0.13%	19.24	0.26%	0.07%	0.45%	72,425,013	181,200,000	404,950,000
	11	BANJARKERTA	242,500,000	108,774,493	3474	0.39%	0.08%	721	0.40%	0.10%	2.70	0.41%	0.12%	28.25	0.38%	0.10%	0.40%	64,499,710	173,274,000	415,774,000
	12	KALLIJARAN	261,250,000	108,774,493	4671	0.53%	0.11%	1139	0.64%	0.16%	3.30	0.50%	0.15%	35.41	0.48%	0.12%	0.53%	86,690,185	195,465,000	456,715,000
	13	KALIORI	248,125,000	108,774,493	4319	0.49%	0.10%	1038	0.58%	0.14%	5.91	0.89%	0.27%	43.97	0.60%	0.15%	0.66%	107,027,573	215,802,000	463,927,000
12	KARANGMONCOL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	KARANGSARI	255,000,000	108,774,493	4190	0.47%	0.09%	778	0.43%	0.11%	3.99	0.60%	0.18%	30.57	0.42%	0.10%	0.49%	79,128,669	187,903,000	442,903,000
	2	PEPEDAN	261,250,000	108,774,493	3732	0.42%	0.08%	539	0.30%	0.08%	3.84	0.58%	0.17%	33.60	0.46%	0.11%	0.45%	72,677,053	181,452,000	442,702,000
	3	PEKIRINGAN	255,000,000	108,774,493	4120	0.46%	0.09%	290	0.16%	0.04%	2.15	0.32%	0.10%	25.02	0.34%	0.09%	0.32%	51,292,738	160,067,000	415,067,000
	4	GRANTUNG	273,750,000	108,774,493	2602	0.29%	0.06%	268	0.15%	0.04%	3.20	0.48%	0.14%	38.45	0.52%	0.13%	0.37%	60,331,459	169,106,000	442,856,000
	5	RAJAWANA	280,000,000	108,774,493	4627	0.52%	0.10%	582	0.32%	0.08%	3.20	0.48%	0.14%	35.03	0.48%	0.12%	0.45%	72,951,887	181,726,000	461,726,000
	6	TAJUG	255,000,000	108,774,493	3687	0.41%	0.08%	545	0.30%	0.08%	2.33	0.35%	0.11%	34.26	0.47%	0.12%	0.38%	61,862,336	170,637,000	425,637,000
	7	TAMANSARI	280,000,000	108,774,493	6796	0.76%	0.15%	672	0.38%	0.09%	6.07	0.92%	0.27%	22.67	0.31%	0.08%	0.60%	97,192,957	205,967,000	485,967,000
	8	BALERAKSA	242,500,000	108,774,493	7883	0.89%	0.18%	746	0.42%	0.10%	4.38	0.66%	0.20%	32.43	0.44%	0.11%	0.59%	95,823,749	204,598,000	447,098,000
	9	TUNJUNG MULI	261,250,000	108,774,493	10812	1.22%	0.24%	2024	1.13%	0.28%	9.10	1.37%	0.41%	19.63	0.27%	0.07%	1.00%	163,123,687	271,898,000	533,148,000
	10	KRAMAT	255,000,000	108,774,493	3767	0.42%	0.08%	533	0.30%	0.07%	2.81	0.42%	0.13%	33.96	0.46%	0.12%	0.40%	65		

	11	SIRAU	255,000,000	108,774,493	4882	0.55%	0.11%	1640	0.92%	0.23%	6.87	1.04%	0.31%	56.23	0.77%	0.19%	0.84%	136,569,362	245,344,000	500,344,000
13	REMBANG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	WLAHAR	261,250,000	108,774,493	3502	0.39%	0.08%	756	0.42%	0.11%	4.41	0.67%	0.20%	30.54	0.42%	0.10%	0.49%	79,224,694	187,999,000	449,249,000
	2	BANTARBARANG	292,500,000	108,774,493	8457	0.95%	0.19%	1776	0.99%	0.25%	9.81	1.48%	0.44%	23.19	0.32%	0.08%	0.96%	156,071,160	264,846,000	557,346,000
	3	KARANGBAWANG	248,750,000	108,774,493	1971	0.22%	0.04%	134	0.07%	0.02%	3.66	0.55%	0.17%	44.62	0.61%	0.15%	0.38%	61,820,250	170,595,000	419,345,000
	4	GUNUNGWULED	280,000,000	108,774,493	5269	0.59%	0.12%	1260	0.70%	0.18%	5.70	0.86%	0.26%	32.83	0.45%	0.11%	0.66%	107,807,412	216,582,000	496,582,000
	5	LOSARI	292,500,000	108,774,493	8698	0.98%	0.20%	970	0.54%	0.14%	7.28	1.10%	0.33%	20.66	0.28%	0.07%	0.73%	118,701,268	227,476,000	519,976,000
	6	BODASKARANGJATI	255,000,000	108,774,493	3954	0.44%	0.09%	555	0.31%	0.08%	2.69	0.41%	0.12%	34.75	0.47%	0.12%	0.41%	66,012,893	174,787,000	429,787,000
	7	WANOGARA WETAN	230,000,000	108,774,493	2755	0.31%	0.06%	690	0.39%	0.10%	2.14	0.32%	0.10%	39.93	0.54%	0.14%	0.39%	63,541,175	172,316,000	402,316,000
	8	WANOGARA KULON	211,250,000	108,774,493	1967	0.22%	0.04%	517	0.29%	0.07%	1.34	0.20%	0.06%	41.92	0.57%	0.14%	0.32%	51,898,828	160,673,000	371,923,000
	9	MAKAM	280,000,000	108,774,493	9021	1.01%	0.20%	1761	0.98%	0.25%	6.79	1.02%	0.31%	19.45	0.26%	0.07%	0.82%	133,499,799	242,274,000	522,274,000
	10	SUMAMPIR	261,250,000	108,774,493	9355	1.05%	0.21%	1911	1.07%	0.27%	5.82	0.88%	0.26%	31.34	0.43%	0.11%	0.85%	137,555,249	246,330,000	507,580,000
	11	TANALUM	223,750,000	108,774,493	3678	0.41%	0.08%	1630	0.91%	0.23%	4.58	0.69%	0.21%	41.58	0.57%	0.14%	0.66%	107,044,187	215,819,000	439,569,000
	12	PANUSUPAN	217,500,000	108,774,493	7964	0.90%	0.18%	1861	1.04%	0.26%	9.41	1.42%	0.43%	40.14	0.55%	0.14%	1.00%	162,596,418	271,371,000	488,871,000
14	BOJONGSARI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	BROBOT	242,500,000	108,774,493	3751	0.42%	0.08%	263	0.15%	0.04%	1.26	0.19%	0.06%	39.03	0.53%	0.13%	0.31%	50,537,851	159,312,000	401,812,000
	2	GEMBONG	223,750,000	108,774,493	3398	0.38%	0.08%	314	0.18%	0.04%	1.28	0.19%	0.06%	34.27	0.47%	0.12%	0.30%	47,920,687	156,695,000	380,445,000
	3	GALUH	236,250,000	108,774,493	2900	0.33%	0.07%	333	0.19%	0.05%	1.04	0.16%	0.05%	34.31	0.47%	0.12%	0.28%	44,773,208	153,548,000	389,798,000
	4	BANJARAN	248,750,000	108,774,493	5514	0.62%	0.12%	1061	0.59%	0.15%	3.32	0.50%	0.15%	35.94	0.49%	0.12%	0.54%	88,444,805	197,219,000	445,969,000
	5	PATEMON	261,250,000	108,774,493	3956	0.44%	0.09%	1181	0.66%	0.16%	2.43	0.37%	0.11%	39.98	0.54%	0.14%	0.50%	81,166,834	189,941,000	451,191,000
	6	BOJONGSARI	298,750,000	108,774,493	5864	0.66%	0.13%	721	0.40%	0.10%	2.33	0.35%	0.11%	20.60	0.28%	0.07%	0.41%	66,251,570	175,026,000	473,776,000
	7	KAJONGAN	236,250,000	108,774,493	5013	0.56%	0.11%	1033	0.58%	0.14%	1.99	0.30%	0.09%	43.21	0.59%	0.15%	0.49%	80,265,304	189,040,000	425,290,000
	8	KARANGBANJAR	261,250,000	108,774,493	4085	0.46%	0.09%	489	0.27%	0.07%	1.52	0.23%	0.07%	37.36	0.51%	0.13%	0.36%	57,816,139	166,591,000	427,841,000
	9	BEJI	223,750,000	108,774,493	3712	0.42%	0.08%	758	0.42%	0.11%	1.52	0.23%	0.07%	29.84	0.41%	0.10%	0.36%	58,392,059	167,167,000	390,917,000
	10	PAGEDANGAN	255,000,000	108,774,493	3768	0.42%	0.08%	820	0.46%	0.11%	1.62	0.24%	0.07%	41.30	0.56%	0.14%	0.41%	67,084,277	175,859,000	430,859,000
	11	PEKALONGAN	255,000,000	108,774,493	5310	0.60%	0.12%	1124	0.63%	0.16%	1.58	0.24%	0.07%	27.63	0.38%	0.09%	0.44%	71,746,280	180,521,000	435,521,000
	12	METENGGENG	205,000,000	108,774,493	3860	0.43%	0.09%	1244	0.69%	0.17%	2.03	0.31%	0.09%	32.24	0.44%	0.11%	0.46%	75,068,226	183,843,000	388,843,000
	13	BUMISARI	248,750,000	108,774,493	7234	0.81%	0.16%	3154	1.76%	0.44%	7.08	1.07%	0.32%	33.18	0.45%	0.11%	1.04%	168,292,388	277,067,000	525,817,000
15	PADAMARA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	KARANGPULE	192,500,000	108,774,493	1366	0.15%	0.03%	240	0.13%	0.03%	0.98	0.15%	0.04%	38.72	0.53%	0.13%	0.24%	39,054,161	147,829,000	340,329,000
	2	SOKAWERA	205,000,000	108,774,493	2435	0.27%	0.05%	313	0.17%	0.04%	1.51	0.23%	0.07%	31.80	0.43%	0.11%	0.27%	44,648,869	153,423,000	358,423,000
	3	KARANGJAMBE	242,500,000	108,774,493	3872	0.44%	0.09%	271	0.15%	0.04%	1.54	0.23%	0.07%	27.13	0.37%	0.09%	0.29%	46,588,950	155,363,000	397,863,000
	4	BOJANEGARA	211,250,000	108,774,493	6047	0.68%	0.14%	528	0.29%	0.07%	1.17	0.18%	0.05%	27.81	0.38%	0.09%	0.36%	58,056,071	166,831,000	378,081,000
	5	GEMURUH	230,000,000	108,774,493	3857	0.43%	0.09%	450	0.25%	0.06%	1.85	0.28%	0.08%	44.00	0.60%	0.15%	0.38%	62,225,007	171,000,000	401,000,000
	6	DAWUHAN	248,750,000	108,774,493	3935	0.44%	0.09%	623	0.35%	0.09%	1.66	0.25%	0.08%	33.02	0.45%	0.11%	0.36%	58,946,186	167,721,000	416,471,000
	7	PRIGI	223,750,000	108,774,493	2957	0.33%	0.07%	416	0.23%	0.06%	1.42	0.21%	0.06%	41.80	0.57%	0.14%	0.33%	53,755,436	162,530,000	386,280,000
	8	PADAMARA	242,500,000	108,774,493	2796	0.31%	0.06%	218	0.12%	0.03%	1.43	0.22%	0.06%	25.60	0.35%	0.09%	0.24%	39,795,147	148,570,000	391,070,000
	9	PURBAYASA	198,750,000	108,774,493	2143	0.24%	0.05%	210	0.12%	0.03%	0.95	0.14%	0.04%	30.45	0.41%	0.10%	0.22%	36,413,399	145,188,000	343,938,000
	10	KALITINGGAR	211,250,000	108,774,493	2543	0.29%	0.06%	182	0.10%	0.03%	0.97	0.15%	0.04%	40.76	0.56%	0.14%	0.27%	43,094,259	151,869,000	363,119,000
	11	MIPIRAN	223,750,000	108,774,493	3170	0.36%	0.07%	857	0.48%	0.12%	1.36	0.20%	0.06%	43.79	0.60%	0.15%	0.40%	65,180,932	173,955,000	397,705,000
	12	KARANGGAMBAS	223,750,000	108,774,493	4007	0.45%	0.09%	567	0.32%	0.08%	1.48	0.22%	0.07%	28.12	0.38%	0.10%	0.33%	53,891,664	162,666,000	386,416,000
	13	KALITINGGAR KIDUL	198,750,000	108,774,493	1662	0.19%	0.04%	121	0.07%	0.02%	0.85	0.13%	0.04%	32.75	0.45%	0.11%	0.20%	33,169,971	141,944,000	340,694,000
16	PENGADEGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	PANUNGGALAN	205,000,000	108,774,493	2091	0.24%	0.05%	362	0.20%	0.05%	3.69	0.56%	0.17%	41.28	0.56%	0.14%	0.41%	65,801,746	174,576,000	379,576,000
	2	LARANGAN	255,000,000	108,774,493	4445	0.50%	0.10%	1026	0.57%	0.14%	4.73	0.71%	0.21%	37.94	0.52%	0.13%	0.59%	95,259,342	204,034,000	459,034,000
	3	PASUNGGINGAN	273,750,000	108,774,493	5710	0.64%	0.13%	1156	0.65%	0.16%	5.29	0.80%	0.24%	33.66	0.46%	0.11%	0.64%	104,546,380	213,321,000	487,071,000
	4	PENGADEGAN	298,750,000	108,774,493	9515	1.07%	0.21%	1971	1.10%	0.28%	6.74	1.02%	0.30%	28.75	0.39%	0.10%	0.89%	144,831,171	253,606,000	552,356,000
	5	KARANGJOHO	211,250,000	108,774,493	1991	0.22%	0.04%	469	0.26%	0.07%	2.46	0.37%	0.11%	40.17	0.55%	0.14%	0.36%	58,180,154	166,955,000	378,205,000
	6	BEDAGAS	255,000,000	108,774,493	4314	0.49%	0.10%	1041	0.58%	0.15%	6.47	0.98%	0.29%	27.50	0.37%	0.09%	0.63%	102,131,572	210,906,000	465,906,000
	7	TUMANGGAL	242,500,000	108,774,493	3910	0.44%	0.09%	1536	0.86%	0.21%	4.17	0.63%	0.19%	36.75	0.50%	0.13%	0.62%	100,046,977	208,821,000	451,321,000
	8	TEGALPINGEN	230,000,000	108,774,493	4318	0.49%	0.10%	1098	0.61%	0.15%	5.06	0.76%	0.23%	32.39	0.44%	0.11%	0.59%	95,738,629	204,513,000	434,513,000
	9	TETEL	211,250,000	108,774,493	2410	0.27%	0.05%	723	0.40%	0.10%	3.48	0.52%	0.16%	42.39	0.58%	0.14%	0.46%	74,204,865	182,979,000	394,229,000
17	KARANGJAMBU		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	PURBASARI	217,500,000	108,774,493	6162	0.69%	0.14%	1483	0.83%	0.21%	9.06	1.37%	0.41%	30.62	0.42%	0.10%	0.86%	139,653,328	248,428,000	465,928,000
	2	SIRANDU	173,750,000	108,774,493	2798	0.31%	0.06%	624	0.35%	0.09%	5.74	0.86%	0.26%	36.27	0.49%	0.12%	0.53%	86,569,733	195,344,000	369,094,000
	3	KARANGJAMBU	205,000,000	108,774,493	5388	0.61%	0.12%	1241	0.69%	0.17%	7.98	1.20%	0.36%	28.05	0.38%	0.10%	0.75%	121,970,184	230,745,000	435,745,000
	4	SANGUWATANG	242,500,000	108,774,493	4894	0.55%	0.11%	1629	0.91%	0.23%	6.80	1.02%	0.31%	42.56	0.58%	0.14%	0.79%	128,284,299	237,059,000	479,559,000
	5	JINGKANG	236,250,000	108,774,493	4176	0.47%	0.09%	1915	1.07%	0.27%	7.80	1.18%	0.35%	33.89	0.46%	0.12%	0.83%	134,707,041	243,482,000	479,732,000

			-															-		-
18	KERTANEGARA		-															-		-
	1	KRANGEAN	261,250,000	108,774,493	6629	0.75%	0.15%	1630	0.91%	0.23%	4.86	0.73%	0.22%	21.05	0.29%	0.07%	0.67%	108,480,551	217,255,000	478,505,000
	2	DARMA	198,750,000	108,774,493	1555	0.17%	0.03%	376	0.21%	0.05%	1.73	0.26%	0.08%	31.41	0.43%	0.11%	0.27%	44,283,394	153,058,000	351,808,000
	3	LANGKAP	236,250,000	108,774,493	3891	0.44%	0.09%	1280	0.71%	0.18%	2.98	0.45%	0.13%	30.73	0.42%	0.10%	0.51%	82,146,709	190,921,000	427,171,000
	4	ADIARSA	230,000,000	108,774,493	3065	0.34%	0.07%	352	0.20%	0.05%	3.65	0.55%	0.17%	30.40	0.41%	0.10%	0.39%	62,818,517	171,593,000	401,593,000
	5	KARANGASEM	230,000,000	108,774,493	4430	0.50%	0.10%	1045	0.58%	0.15%	3.97	0.60%	0.18%	23.30	0.32%	0.08%	0.50%	81,889,384	190,664,000	420,664,000
	6	KARANGPUCUNG	217,500,000	108,774,493	2207	0.25%	0.05%	342	0.19%	0.05%	1.64	0.25%	0.07%	28.70	0.39%	0.10%	0.27%	43,724,501	152,499,000	369,999,000
	7	CONDONG	186,250,000	108,774,493	1769	0.20%	0.04%	289	0.16%	0.04%	1.13	0.17%	0.05%	43.98	0.60%	0.15%	0.28%	45,659,311	154,434,000	340,684,000
	8	KASIH	223,750,000	108,774,493	3195	0.36%	0.07%	694	0.39%	0.10%	2.28	0.34%	0.10%	29.23	0.40%	0.10%	0.37%	60,287,430	169,062,000	392,812,000
	9	KARANGTENGAH	236,250,000	108,774,493	3010	0.34%	0.07%	632	0.35%	0.09%	1.77	0.27%	0.08%	27.66	0.38%	0.09%	0.33%	53,624,709	162,399,000	398,649,000
	10	KERTANEGARA	248,750,000	108,774,493	4333	0.49%	0.10%	312	0.17%	0.04%	1.87	0.28%	0.08%	25.89	0.35%	0.09%	0.31%	50,967,253	159,742,000	408,492,000
	11	MERGASANA	211,250,000	108,774,493	1650	0.19%	0.04%	163	0.09%	0.02%	1.14	0.17%	0.05%	33.64	0.46%	0.11%	0.23%	36,722,626	145,496,000	356,746,000
			-																	-
		TOTAL	52,449,375,000	24,365,486,400	889,376	100%	20%	179,167	100%	25%	663	100%	30%	7,343	100%	25%	100%	16,243,659,600	40,609,150,000	93,058,525,000

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT DOKUMEN PENYALURAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

1. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN ADD TAHAP I
 - Form 1.1. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa;
 - Form 1.2. Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari Kecamatan;
 - Form 1.3. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana yang telah diverifikasi dari Kecamatan;
 - Form 1.4. Surat Pernyataan Penyaluran ADD;
 - Form 1.5. Kuitansi Pembayaran;
 - Form 1.6. Foto copy nomor rekening pemerintah desa;
 - Form 1.7. Pakta integritas;
 - Form 1.8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - Form 1.9. Laporan Realisasi APB Desa Tahun sebelumnya;
 - Form 1.10. Peraturan Desa tentang APB Desa.

2. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN ADD TAHAP II
 - Form 2.1. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
 - Form 2.2. Surat Pengantar permohonan penyaluran dana dari Kecamatan;
 - Form 2.3. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
 - Form 2.4. Kuitansi Pembayaran;
 - Form 2.5. Laporan realisasi kegiatan minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penyaluran Tahap I;
 - Form 2.6. Foto copy buku rekening pemerintah desa;

3. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN ADD TAHAP III
 - Form 3.1. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
 - Form 3.2. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
 - Form 3.3. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
 - Form 3.4. Kuitansi Pembayaran;
 - Form 3.5. Laporan realisasi kegiatan minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penyaluran Tahap I dan Tahap II;
 - Form 3.6. Foto copy buku rekening pemerintah desa.

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
ttd

WAHYU KONTARDI